

PERAN DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMENUHAN HAK REHABILITASI SOSIAL ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Aulianisa Azza Camelia¹, Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.²

INTISARI

Penulisan hukum ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual serta permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan rehabilitasi sosial tersebut; 2) Menemukan solusi perbaikan yang tepat untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta di masa yang akan datang berdasarkan analisis temuan yang telah dilakukan.

Penulisan hukum ini merupakan penelitian normatif-empiris untuk meneliti permasalahan yang terjadi di lapangan dan mengkajinya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penulisan hukum ini bersifat deskriptif yang mendeskripsikan fakta mengenai peran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pemenuhan hak rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual. Penulisan hukum ini menganalisis dua jenis data, yaitu data sekunder yang diperoleh dengan cara pengumpulan data melalui studi dokumen dan data primer yang diperoleh dengan cara pengumpulan data melalui wawancara kepada responden beserta narasumber terkait. Analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan pemenuhan hak rehabilitasi sosial anak korban kekerasan seksual, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2019. Kemudian, penelitian ini menemukan berbagai permasalahan, yaitu kendala internal, belum adanya harmonisasi dan implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial oleh pemerintah di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta, ketiadaan sistem pendataan yang terstruktur serta tantangan reintegrasi sosial pasca-rehabilitasi. Permasalahan-permasalahan yang terjadi ini telah dianalisis sehingga menghasilkan solusi perbaikan di masa yang akan datang.

Kata Kunci: rehabilitasi sosial, anak korban kekerasan seksual, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

¹ Mahasiswa Konsentrasi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

***THE ROLE OF THE DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
IN FULFILLING THE SOCIAL REHABILITATION RIGHTS OF CHILD
VICTIMS OF SECUAL VIOLENCE***

Aulianisa Azza Camelia³, Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.⁴

ABSTRACT

This legal writing aims to: 1) Identify and analyze the rights of social rehabilitation of child victims of sexual violence and the problems faced by the Yogyakarta Special Region Social Service in implementing the social rehabilitation; 2) Find appropriate solutions for the implementation of social rehabilitation of child victims of sexual violence by the Yogyakarta Special Region Social Service in the future based on the analysis of the findings that have been carried out.

This legal writing is a normative-empirical study to examine problems that occur in the field and examine them with applicable legal provisions. This legal writing is descriptive, describing facts regarding the role of the Yogyakarta Special Region Social Service in fulfilling the social rehabilitation rights of child victims of sexual violence. This legal writing analyzes two types of data: secondary data obtained through data collection through document studies and primary data obtained through data collection through interviews with respondents and related sources. Data analysis is carried out through qualitative descriptive analysis.

The results of this study indicate that in conserving the rights to social rehabilitation of child victims of sexual violence, the Social Service of the Special Region of Yogyakarta refers to the Regulation of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Number 2 of 2025 and the Regulation of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Number 21 of 2019. Then, this study found various problems, namely internal obstacles, the lack of harmonization and implementation of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Social Rehabilitation Assistance by the government at the Special Region of Yogyakarta level, the absence of a structured data collection system and the challenges of post-rehabilitation social reintegration. These problems that occurred have been explained so as to suggest solutions for improvements in the future.

Key Words: *social rehabilitation, child victims of sexual violence, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta*

³ Mahasiswa Konsentrasi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.